



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/89 /B.X/HK/2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah hilang dan atau dalam keadaan sudah rusak dan atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dihapuskan dapat dijual/sewa belikan dengan cara pelelangan terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai dan atau yang akan dihapuskan, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materil Daerah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang yang dikuasai Negara;
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Barang Milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan Rusak Berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan personalia sebagaimana diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. susunan personalia Panitia pelelangan Terbatas untuk penjualan Tanah, Gedung, Kendaraan Dinas, dan Rumah Dinas Golongan III dan Penghapusan Barang Inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. susunan personalia panitia pelelangan terbatas untuk penjualan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung selain dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melibatkan 1 (satu) orang unsur dari Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penghapusan bertugas:
  - a. meneliti fisik administrasi dan melakukan penaksiran terhadap Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan dan dipindahtanggankan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal yang meliputi unsur pemakai, kondisi barang, status kepemilikannya, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
  - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Panitia Pelelangan Terbatas bertugas:

- a. meneliti kepemilikan barang daerah yang hendak dilakukan penjualan;
- b. meneliti fisik serta nilai jual barang inventaris tersebut;
- c. meneliti persyaratan pihak pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;
- d. melaksanakan penjualan/pelelangan Terbatas; dan
- e. mengadministrasikan serta mendokumentasikan proses pelaksanaan Penjualan/Pelelangan tersebut.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2014 kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.10.37.12.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-2-2014**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**SJACHRÖEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung; Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/89 /B.X/HK/2014**  
**TANGGAL : 17 Februari 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PANITIA PENGHAPUSAN DAN  
PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.12.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris I	200.000,-	
6.	Kasubbag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris II	175.000,-	
7.	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kabag Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kasi Bangunan Gedung Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kasubbag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
14.	Kasubbag. Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	SARWOKO NOVI HARDI, SE (JFU/Auditor Inspektorat Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	GANDI PRAMANA, SE (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	ERYADI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	SUDARLINA FEBRI. K (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	RADEN ATMAJA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
23.	ANDI YUSMIRAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
24.	NADIRSYAH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
25.	MARSIAH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
26.	IRFANSYAH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**